



Siapkan Dana Khusus Bupati Akan Koordinasi BPK

Borneo Tribune, Sukadana

Bupati Kayong Utara H. Hildi Hamid tidak ingin terseret ke "hotel prodoe" karena salah dalam mengambil kebijakan terkait pendanaan pendamping program jaminan sosial kesehatan, sehingga dirinya akan sesegera mungkin berkoordinasi dengan badan pemeriksa keuangan (BPK) sebelum menentukan kebijakan.

Hal tersebut dilakukan sebagai salah satu upaya untuk mengakomodir pelayanan kesehatan ditingkat puskesmas yang tidak dapat diklaim di Badan Jaminan Sosial (BPJS).

Saat ini menjadi permasalahan di tingkat pelayanan puskesmas adalah tindakan yang tidak dapat diklaim di tingkat puskesmas, dimana

sering terjadi pasien yang ditangani dan terpaksa harus dirujuk ke tingkat yang lebih tinggi, namun di sisi lain, pasien tersebut belum terdaftar sebagai anggota BPJS, sehingga harus didaftarkan untuk dapat ditangani di tingkat yang lebih tinggi tersebut.

"Pasien yang baru saja dibuatkan BPJS-nya secara otomatis tidak dapat diklaim di tingkat puskesmas dan di bawahnya, dan inilah yang sedang kita cari celah untuk dibiayai klaimnya dari APBD," kata Hildi Hamid.

Biaya pelayanan jasa para medis tersebut, apakah dibenarkan dan diperbolehkan untuk dibiayai di APBD seperti dahulu Jamkesda berlaku, dimana jasa paramedis bisa dihargai pelayanannya. (DL)